

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Badrulzaman, Mariam Darus. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1981). *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. (2007). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Koentjaraningrat. (1990). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Az. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- Sidabalok, Janus. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa.

Sunggono, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 246.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

C. Sumber Lain

Dokumen Resmi Lembaga

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Daftar Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital Posisi 15 Oktober 2025*. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada 4 Mei 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Siaran Pers OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum Investasi Kripto, Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026*. SP 67/DKPU/OJK/IV/2026. Jakarta, 7 April 2026. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada 4 Mei 2026.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers OJK Terbitkan Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Berizin/Terdaftar*. SP 226/GKPB/OJK/XII/2025. Jakarta, 19 Desember 2025. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada 4 Mei 2026.

PT Tiga Inti Utama. (2026). *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Triv*. Triv. Diakses pada 4 Mei 2026.

Sumber Internet

Ajaib. (2026). *Investor Kripto RI Tembus 20,19 Juta, OJK Catat Transaksi 2025 Capai Rp482 Triliun*. 27 Februari 2026. Ajaib. Diakses pada 4 Mei 2026.

Beritasatu. (2025). *Bappebti: Perdagangan Aset Kripto Meroket, Nilai Transaksi Rp650,61 Triliun pada 2024*. 24 Januari 2025. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Diakses pada 4 Mei 2026.